



# Membangun Ketahanan Wilayah Berbasis Kesejahteraan: Peran Strategis Korem dalam Penguatan Koperasi Merah Putih

Rully Panjaitan<sup>1</sup>, Edy Iwan Bangun<sup>2</sup>, Eka Yudha Muharom<sup>3</sup>, Rofi Hidayatur Rakhman<sup>4</sup>

<sup>1,2,3,4</sup>Sekolah Staf dan Komando Angkatan Laut, Indonesia

E-mail: [jokotingkir777999@gmail.com](mailto:jokotingkir777999@gmail.com), [opiana53@gmail.com](mailto:opiana53@gmail.com)

Article Info	Abstract
<b>Article History</b> Received: 2026-03-07 Revised: 2026-04-13 Published: 2026-05-11	This study analyze the strategic integration of territorial development functions by Korem 051/Wijayakarta to strengthen Koperasi Merah Putih within complex urban environments, specifically Kodim 0505/Jakarta Timur and Kodim 0504/Jakarta Selatan. It addresses critical implementation gaps between national economic policies and localized grassroots empowerment. Employing a qualitative descriptive case study design, primary data were gathered through semi-structured interviews with territorial commanders, Babinsa, municipal officials, and cooperative agencies, supplemented by comprehensive policy document analysis. Inductive thematic coding and rigorous methodological triangulation ensured robust empirical validity. Findings reveal that strategic effectiveness critically depends on harmonized command planning, enhanced technical competencies of field personnel in modern cooperative management, and institutionalized collaborative governance networks with local stakeholders. Consequently, an integrative and adaptive Policy-Strategy-Effort framework was formulated as a comprehensive territorial development blueprint. Theoretically, this research bridges territorial defense scholarship with contemporary cooperative governance, reinforcing the security-prosperity paradigm within military doctrine. Practically, it delivers actionable operational guidelines for territorial commands to optimize cooperative empowerment professionally, measurably, and sustainably, thereby advancing urban welfare-based national resilience. Digital transformation remains essential for long-term sustainability. Continuous capacity building is mandatory.
<b>Keywords:</b> <i>Regional Resilience; Welfare-Based; The Strategic Role of the Regional Military Command; The Red and White Cooperative.</i>	

Artikel Info	Abstrak
<b>Sejarah Artikel</b> Diterima: 2026-03-07 Direvisi: 2026-04-13 Dipublikasi: 2026-05-11	Penelitian ini menganalisis strategi Korem 051/Wijayakarta dalam mendukung penguatan Koperasi Merah Putih melalui fungsi Pembinaan Teritorial di wilayah urban kompleks, khususnya Kodim 0505/Jakarta Timur dan Kodim 0504/Jakarta Selatan. Menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan desain studi kasus, data dikumpulkan melalui wawancara mendalam dengan perwira teritorial, Babinsa, pemerintah daerah, dan Dinas Koperasi, dilengkapi telaah dokumen kebijakan. Analisis data dilakukan secara induktif dengan triangulasi sumber untuk memvalidasi temuan empiris. Hasil penelitian mengidentifikasi lima dimensi determinan: integrasi kebijakan berbasis pendampingan struktural, formulasi strategi <i>ends-ways-means</i> yang menempatkan ketahanan kesejahteraan sebagai tujuan komando, keterbatasan kompetensi teknis Babinsa, tantangan eksternal dominasi pasar modern, serta mekanisme collaborative governance yang memerlukan kelembagaan terstruktur. Berdasarkan sintesis tersebut, penelitian merumuskan kerangka Kebijakan, Strategi, dan Upaya (KSU) yang integratif dan adaptif sebagai grand design pembinaan teritorial. Secara teoritis, kajian ini menjembatani literatur pertahanan wilayah dengan manajemen koperasi kontemporer, memperkuat paradigma security-prosperity dalam doktrin Binter. Secara praktis, temuan memberikan pedoman operasional bagi satuan kewilayahan untuk mengoptimalkan peran koperasi secara profesional dan berkelanjutan guna menopang ketahanan nasional berbasis kesejahteraan masyarakat urban.
<b>Kata kunci:</b> <i>Ketahanan Wilayah; Berbasis Kesejahteraan; Peran Strategi Korem; Koperasi Merah Putih.</i>	

## I. PENDAHULUAN

Koperasi secara konstitusional telah lama diposisikan sebagai sokoguru perekonomian nasional sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 33 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945, yang menekankan bahwa perekonomian disusun sebagai usaha bersama berlandaskan asas

kekeluargaan. Dalam kerangka Ekonomi Pancasila, koperasi tidak hanya berfungsi sebagai entitas bisnis, melainkan sebagai instrumen demokrasi ekonomi yang mengedepankan prinsip keadilan sosial, partisipasi anggota, dan pemerataan hasil pembangunan. Secara empiris, data Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan

Menengah (2024) mencatat terdapat lebih dari 130.000 koperasi aktif di Indonesia yang memberikan kontribusi signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja dan penguatan sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Namun demikian, kontribusi koperasi terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) nasional masih berada pada kisaran 5–6%, sebuah angka yang jauh di bawah potensi demografis dan geografis Indonesia. Ketimpangan ekonomi, disparitas akses modal, dan lemahnya tata kelola kelembagaan di tingkat desa dan kelurahan masih menjadi persoalan struktural yang menghambat optimalisasi peran koperasi, khususnya di kawasan urban yang kompleks seperti Jakarta Timur dan Jakarta Selatan.

Sebagai respons terhadap dinamika tersebut, pemerintah pada tahun 2025 meluncurkan program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP) melalui Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2025, yang ditindaklanjuti dengan Peraturan Menteri Koperasi Nomor 1 dan 2 Tahun 2025 serta Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49 Tahun 2025 mengenai skema pembiayaan dan tata kelola pendanaannya. Program ini menargetkan pembentukan hingga 80.000 koperasi baru dengan orientasi tidak hanya pada penguatan ekonomi lokal, tetapi juga pada peningkatan ketahanan pangan, optimalisasi distribusi logistik, dan pemberdayaan UMKM. Dalam kerangka Operasi Militer Selain Perang (OMSP) yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 tentang Tentara Nasional Indonesia, pelibatan satuan kewilayahan diarahkan pada aspek pendampingan, validasi lokasi, validasi data, serta penguatan sinergi sosial. Korem 051/Wijayakarta, yang mencakup wilayah Jakarta Selatan, Jakarta Timur, Depok, serta Kota dan Kabupaten Bekasi, memiliki posisi strategis dalam mengintegrasikan fungsi pembinaan teritorial dengan program penguatan koperasi. Fungsi Binter yang mencakup pembinaan wilayah, komunikasi sosial, dan perlawanan wilayah diproyeksikan menjadi instrumen vital dalam menjembatani kebijakan nasional dengan implementasi di tingkat akar rumput.

Meskipun terdapat landasan normatif yang kuat, implementasi di lapangan menghadapi sejumlah kesenjangan. Aparat teritorial seringkali belum memiliki kompetensi teknis yang memadai dalam manajemen koperasi modern, literasi keuangan, serta adaptasi terhadap transformasi digital. Beban tugas Binter yang multifungsi, dominasi pasar modern, rendahnya minat generasi muda terhadap model

koperasi konvensional, serta minimnya integrasi lintas sektor dengan pemerintah daerah dan dinas koperasi menjadi hambatan krusial. Fenomena ini memunculkan urgensi untuk mengkaji secara mendalam bagaimana strategi kewilayahan dapat dirancang secara adaptif, integratif, dan kolaboratif. Berdasarkan konteks tersebut, penelitian ini diformulasikan melalui dua rumusan masalah utama, yaitu: 1. Bagaimana arah kebijakan dan prioritas Korem 051/Wijayakarta dalam mengintegrasikan fungsi Pembinaan Teritorial (Binter) dengan penguatan Koperasi Merah Putih di wilayah Kodim 0505/Jakarta Timur dan Kodim 0504/Jakarta Selatan? 2. Dalam perspektif strategi (*ends, ways, means*), bagaimana memformulasikan tujuan (*ends*) penguatan koperasi sebagai bagian dari ketahanan wilayah?.

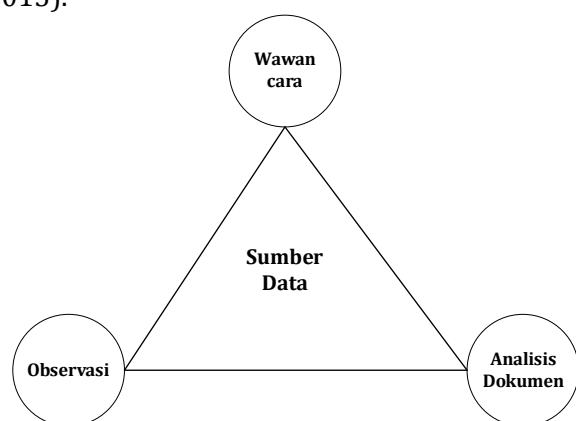
Sejumlah penelitian terdahulu telah mengidentifikasi faktor-faktor krusial yang memengaruhi efektivitas pembinaan teritorial dan pemberdayaan ekonomi kerakyatan, yang secara langsung menjadi landasan konseptual bagi studi ini. Tjokro (2025) menegaskan bahwa integrasi pilar Binter berkontribusi signifikan terhadap ketahanan wilayah, namun memerlukan penyesuaian konteks agar tidak bersifat administratif semata. Sementara itu, (Abdillah *et al.*, 2025) menekankan bahwa ketahanan wilayah urban hanya dapat dicapai melalui *collaborative governance* yang memfasilitasi *principled engagement*, motivasi bersama, dan kapasitas aksi lintas sektor. Faktor-faktor tersebut mulai dari harmonisasi perencanaan komando, kompetensi teknis aparat pendamping, tata kelola koperasi yang adaptif, hingga mekanisme kolaborasi kelembagaan menjadi variabel determinan yang mengarahkan fokus penelitian ini pada perumusan strategi pembinaan teritorial yang integratif dan berbasis kemitraan strategis di wilayah urban kompleks.

Kajian ini bertujuan untuk memetakan arah kebijakan, menganalisis mekanisme integrasi strategis, serta merumuskan kerangka pembinaan yang selaras dengan tantangan wilayah urban. Pendekatan yang digunakan pada studi ini bersifat kualitatif deskriptif, di mana peneliti berperan sebagai instrumen utama dalam menggali dinamika kelembagaan, pola koordinasi, dan implementasi kebijakan secara mendalam, sehingga temuan yang dihasilkan dapat memberikan kontribusi baik secara teoretis maupun praktis dalam pengembangan strategi pertahanan non-militer dan pemberdayaan ekonomi kerakyatan.

## II. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan desain studi kasus untuk mengeksplorasi secara mendalam strategi Korem 051/Wijayakarta dalam mendukung penguatan Koperasi Merah Putih melalui fungsi Pembinaan Teritorial di wilayah urban yang kompleks (Creswell, 2013). Unit analisis difokuskan pada dinamika perencanaan, pelaksanaan operasional, dan pola kolaborasi lintas sektor di lingkungan Korem 051/Wijayakarta, khususnya Kodim 0505/Jakarta Timur dan Kodim 0504/Jakarta Selatan. Data primer dikumpulkan melalui wawancara mendalam semi-terstruktur dengan dua belas narasumber kunci yang dipilih secara purposif berdasarkan kompetensi dan keterlibatan langsung dalam program, meliputi pimpinan dan staf teritorial, Danramil, Babinsa, kepala daerah, serta pejabat Dinas Koperasi dan UMKM setempat. Data sekunder diperoleh dari telaah dokumen kebijakan nasional dan daerah, peraturan perundang-undangan terkait OMSP dan koperasi, laporan kinerja satuan, serta literatur akademik relevan, yang dilengkapi dengan observasi lapangan dan studi dokumentasi untuk memastikan kelengkapan konteks empiris.

Analisis data dilakukan secara induktif dan sistematis melalui triangulasi data komprehensif yang mencakup triangulasi sumber, metode, dan teori untuk menguji konsistensi temuan empiris dengan perspektif multidisiplin (Sugiyono, 2015).



Gambar 1. Triangulasi data

Teknik triangulasi ini diterapkan guna memverifikasi data dari berbagai sumber (informan kunci, dokumen kebijakan, observasi lapangan), metode pengumpulan (wawancara mendalam, observasi, dan analisis dokumen), dan kerangka teori (strategi pertahanan, pembinaan teritorial, dan teori ketahanan wilayah) sehingga memastikan kredibilitas dan keabsahan hasil.

## III. HASIL DAN PEMBAHASAN

### A. Hasil Penelitian

Berdasarkan hasil pengumpulan dan pengolahan data, ditemukan bahwa Korem 051/Wijayakarta telah menyusun arah kebijakan dan prioritas strategis yang secara eksplisit mengintegrasikan fungsi pembinaan teritorial dengan program penguatan Koperasi Merah Putih. Kebijakan tersebut diterjemahkan ke dalam rencana aksi kewilayahan yang menekankan pada pendampingan struktural, validasi data potensi ekonomi lokal, serta fasilitasi akses pembiayaan dan pasar bagi koperasi binaan.

Tabel 1. Temuan utama penelitian

No.	Dimensi Analisis	Temuan Empiris	Implikasi Strategis
1	Arah Kebijakan & Prioritas	Integrasi Binter dengan Koperasi Merah Putih difokuskan pada pendampingan struktural, validasi data potensi ekonomi lokal, dan fasilitasi akses pembiayaan; prioritas pada penguatan kapasitas Babinsa, komunikasi sosial, dan jejaring kolaboratif	Perlunya harmonisasi perencanaan komando dengan roadmap pembangunan daerah agar intervensi Binter tidak bersifat insidental
2	Formulasi Strategi (Ends, Ways, Means)	Ends: ketahanan wilayah berbasis kesejahteraan; Ways: pendekatan kolaboratif, pendampingan berbasis data, adaptasi digital; Means: SDM terlatih, struktur komando adaptif, dukungan anggaran dan akses pembiayaan	Kerangka <i>ends-ways-means</i> memastikan koherensi antara tujuan strategis, metode pencapaian, dan ketersediaan sumber daya
3	Faktor Internal Penentu	Kompetensi teknis Babinsa dalam manajemen koperasi dan literasi keuangan masih terbatas; beban tugas Binter yang multifungsi; sistem monitoring evaluasi belum terstandarisasi	Penguatan kapasitas SDM melalui pelatihan berkelanjutan dan standardisasi prosedur pendampingan menjadi imperatif
4	Faktor Eksternal Penentu	Dominasi pasar modern, rendahnya partisipasi generasi muda, keterbatasan literasi digital koperasi; koordinasi lintas sektor masih bersifat informal	Diperlukan kelembagaan kolaborasi formal melalui MoU dan forum koordinasi terstruktur dengan pemangku kepentingan lokal

No.	Dimensi Analisis	Temuan Empiris	Implikasi Strategis
5	Mekanisme Collaborative Governance	Jejaring dengan pemerintah daerah dan dinas koperasi telah terbangun secara informal melalui forum kewilayahan; belum ada mekanisme akuntabilitas bersama yang terlembagakan	Penguatan <i>principled engagement, shared motivation, dan capacity for joint action</i> menjadi prasyarat keberlanjutan program

Sumber: hasil olahan peneliti, 2026

## B. Pembahasan

Temuan penelitian yang terangkum dalam Tabel 1. mengindikasikan bahwa efektivitas strategi Korem 051/Wijayakarta dalam mendukung penguatan Koperasi Merah Putih sangat bergantung pada harmonisasi perencanaan komando, peningkatan kompetensi teknis Babinsa, serta penguatan jejaring *collaborative governance* dengan pemangku kepentingan lokal. Keselarasan antara arahan strategis Korem dan rencana teknis Kodim perlu dioptimalkan agar tidak berhenti pada tataran administratif, tetapi benar-benar terukur, adaptif, dan berorientasi pada pemberdayaan ekonomi masyarakat. Temuan ini sejalan dengan (Abdurohim, 2026) yang menegaskan bahwa keberhasilan program koperasi di wilayah urban memerlukan penguatan kapasitas SDM aparatur kewilayahan dalam manajemen koperasi modern, analisis kelayakan usaha, dan literasi digital. Tanpa penguatan kompetensi teknis yang sistematis, pendampingan Babinsa berpotensi kurang efektif dalam menghadapi kompleksitas tata kelola kelembagaan serta meningkatnya daya saing pasar modern.

Formulasi strategi berbasis kerangka *ends, ways, means* (Lykke, 1989) yang ditemukan dalam penelitian ini memberikan landasan konseptual yang kokoh bagi perumusan tujuan penguatan koperasi sebagai instrumen ketahanan wilayah. Tujuan strategis (*ends*) yang diformulasikan oleh pimpinan Korem tidak lagi terbatas pada stabilitas keamanan fisik, melainkan diperluas menjadi pencapaian ketahanan sosial-ekonomi melalui kemandirian masyarakat. Koperasi diposisikan sebagai simpul penggerak ekonomi mikro yang mampu mengurangi kesenjangan, menyerap tenaga kerja lokal, dan memperkuat daya tahan wilayah terhadap guncangan eksternal.

Temuan ini konsisten dengan kajian Archer *et al* (2020) yang menekankan bahwa

ketahanan komunitas lokal dibangun melalui kapasitas adaptasi terhadap tekanan eksternal dan penguatan mekanisme ekonomi kolektif. Cara-cara pencapaian (*ways*) yang difokuskan pada pendekatan kolaboratif, pendampingan berbasis data, dan adaptasi teknologi digital juga selaras dengan prinsip *collaborative governance* yang digagas Emerson dan Nabatchi (2021), di mana keberhasilan kebijakan publik memerlukan *principled engagement, shared motivation, dan capacity for joint action* antar aktor sipil dan militer. Sarana pendukung (*means*) yang mencakup SDM aparat teritorial yang kompeten, struktur komando adaptif, serta akses ke skema pembiayaan produktif, memperkuat argumen Birchall (2022) bahwa keberlanjutan koperasi sangat bergantung pada keseimbangan antara identitas sosial dan efisiensi bisnis melalui tata kelola yang profesional dan transparan.

Penguatan jejaring *collaborative governance* dengan pemangku kepentingan lokal menjadi prasyarat utama dalam mewujudkan kerangka Kebijakan, Strategi, dan Upaya (KSU) yang integratif dan berbasis kemitraan lintas sektor. Penelitian ini secara teoritis menjembatani literatur pertahanan teritorial dengan manajemen koperasi modern melalui pendekatan tata kelola kolaboratif yang menekankan prinsip keterlibatan aktif, motivasi bersama, dan kapasitas aksi bersama. Temuan tersebut memperkuat paradigma *security-prosperity* dalam doktrin Binter, di mana stabilitas wilayah tidak lagi hanya diukur dari aspek keamanan konvensional, melainkan juga dari ketahanan ekonomi masyarakat yang dibangun melalui kelembagaan koperasi yang profesional, transparan, dan akuntabel (Tjokro (2025). Dengan demikian, integrasi fungsi pertahanan dengan ekonomi kerakyatan menciptakan sinergi strategis yang responsif terhadap dinamika sosial-ekonomi wilayah metropolitan.

Berdasarkan sintesis empiris dan teoretis tersebut, rekomendasi strategis diarahkan untuk menjadi pedoman operasional bagi Korem dan Kodim dalam mengoptimalkan peran koperasi secara profesional, terukur, dan berkelanjutan guna menopang ketahanan nasional berbasis kesejahteraan masyarakat urban. Implementasi pembentukan forum koordinasi terlembaga dengan pemerintah daerah dan dinas koperasi, serta integrasi sistem monitoring dan evaluasi yang transparan. Langkah ini diharapkan dapat

menjawab tantangan struktural seperti kesenjangan akses modal, rendahnya partisipasi generasi muda, dan kebutuhan adaptasi terhadap transformasi digital (Suryadi dan Firmansyah, 2021).

Secara keseluruhan, pembahasan ini mengonfirmasi bahwa strategi Korem 051/Wijayakarta dalam mendukung penguatan Koperasi Merah Putih memiliki potensi besar untuk memperkuat ketahanan wilayah berbasis kesejahteraan, apabila didukung oleh penguatan kapasitas SDM aparat teritorial, standardisasi sistem pendampingan, dan komitmen kelembagaan yang konsisten. Rekomendasi strategis yang dihasilkan dari penelitian ini diharapkan menjadi pedoman operasional bagi satuan kewilayahan dalam mengoptimalkan peran koperasi secara profesional, terukur, dan berkelanjutan, guna menopang ketahanan nasional di tengah kompleksitas dinamika wilayah urban.

#### IV. SIMPULAN DAN SARAN

##### A. Simpulan

Strategi Korem 051/Wijayakarta dalam mendukung penguatan Koperasi Merah Putih melalui fungsi Pembinaan Teritorial telah diarahkan pada integrasi kebijakan, penguatan kapasitas aparat kewilayahan, dan kolaborasi lintas sektor, dengan formulasi berbasis *ends-ways-means* yang menempatkan ketahanan wilayah sebagai tujuan strategis melalui kemandirian ekonomi masyarakat. Efektivitas implementasi strategi sangat bergantung pada harmonisasi perencanaan komando, kompetensi teknis Babinsa dalam pendampingan koperasi modern, serta kelembagaan *collaborative governance* yang terstruktur dengan pemangku kepentingan lokal.

Kerangka Kebijakan, Strategi, dan Upaya (KSU) yang integratif, adaptif, dan berbasis kemitraan lintas sektor dirumuskan sebagai *grand design* pembinaan teritorial yang menjembatani literatur pertahanan wilayah dan manajemen koperasi modern, sekaligus memperkuat paradigma *security-prosperity* dalam doktrin Binter guna menopang ketahanan nasional berbasis kesejahteraan masyarakat urban.

##### B. Saran

Berdasarkan simpulan penelitian, berikut direkomendasikan beberapa langkah strategis untuk mengoptimalkan implementasi strategi

pembinaan teritorial dalam mendukung penguatan Koperasi Merah Putih di wilayah urban:

1. Integrasi modul pelatihan manajemen koperasi modern, literasi keuangan digital, dan analisis kelayakan usaha ke dalam kurikulum pembinaan teritorial secara berkelanjutan untuk meningkatkan kompetensi teknis aparat kewilayahan.
2. Pelembagaan forum koordinasi lintas sektor antara Korem, Kodim, pemerintah daerah, dan dinas koperasi melalui memorandum kesepahaman yang mengatur pembagian peran, indikator keberhasilan, dan mekanisme akuntabilitas bersama.
3. Pengembangan sistem monitoring dan evaluasi berbasis data digital untuk memastikan transparansi, efisiensi, dan keberlanjutan program pendampingan koperasi di wilayah urban.
4. Penelitian lanjutan disarankan mengembangkan kajian longitudinal untuk mengukur dampak jangka panjang strategi pembinaan teritorial terhadap pertumbuhan ekonomi koperasi, serta studi komparatif antara model pembinaan di wilayah urban dan pedesaan guna memperkaya khazanah ilmu strategi pertahanan non-militer.

#### DAFTAR RUJUKAN

- Abdillah, A. et al. (2025) "Resilience governance: a concepts analysis and research synthesis," *Discover Environment*, 3(1), p. 50.
- Abdulloh, D. (2026) *Buku Referensi Kewirausahaan Koperasi Merah Putih: Model, Strategi, Dan Implementasi Pembangunan Ekonomi Berkelanjutan*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia.
- Archer, D. et al. (2020) "The role of collective and individual assets in building urban community resilience," *International Journal of Urban Sustainable Development*, 12(2), pp. 169-186.
- Birchall, J. (2022) "Co-operatives in the Twenty First Century," *Journal of Co-operative Studies*, 55(1), pp. 94-100.
- Creswell, John. *RESEARCH Design , Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches*, 2013.

- Nabatchi, T. and Emerson, K. (2021) "24. Implementation in collaboration governance," *Handbook of collaborative public management*, 402.
- Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia, *Data Koperasi dan UMKM Tahun 2024*, Jakarta: Kemenkop UKM RI, 2024
- Sugiyono. *Metode Penelitian Pendidikan - Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*. Ed-22. Bandung: Alfabeta, 2015.
- Suryadi, K. dan Firmansyah, I. (2021) 'Transformasi digital koperasi dan ketahanan ekonomi masyarakat perkotaan', *Jurnal Ekonomi Kerakyatan*, 15(1), pp. 78-95.
- Tjokro, V.A. (2025) "Strategi Pembinaan Teritorial Tentara Indonesia Dalam Mewujudkan Ketahanan Pangan Nasional."